

**IMPLEMENTASI PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR  
JALAN OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA  
(Studi Kasus pada Jalan Simpang Pasir Kecamatan Palaran)**

**Jauza Hashifah Maulida, Kus Indarto**

**eJournal Administrasi Publik  
Volume 13, Nomor 1, 2025**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Pemeliharaan Infrastruktur Jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda (Studi Kasus pada Jalan Simpang Pasir Kecamatan Palaran).

Pengarang : Jauza Hashifah Maulida

NIM : 1702015033

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 1 Maret 2025

**Pembimbing,**



**Dr. Kus Indarto, M.AP**  
**NIP. 19740401 200604 1 001**

---

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

**Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik**

**Volume : 13**

**Nomor : 1**

**Tahun : 2025**

**Halaman : 196-208**

# IMPLEMENTASI PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA (Studi Kasus pada Jalan Simpang Pasir Kecamatan Palaran)

Jauza Hashifah Maulida <sup>1</sup>, Kus Indarto <sup>2</sup>

## Abstrak

*Kemudahan akses mobilitas menjadi salah satu faktor keberhasilan pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat. Selaras dengan adanya pengadaan infrastruktur, maka pemeliharaan jalan dilakukan guna mengoptimalkan pelayanan. Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas PUPR-PERA Prov. Kaltim yang bertujuan menganalisis Implementasi Kebijakan pemeliharaan infrastruktur jalan di Jalan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dan menganalisis faktor penghambat pemeliharaan infrastruktur jalan oleh Dinas PUPR-PERA Prov.Kaltim di Jalan Simpang Pasir Kecamatan Palaran. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif, sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian: (1) Pemeliharaan yang terencana; (2) Pemeliharaan yang tak terencana; (3) Faktor Penghambat Pemeliharaan Infrastruktur Jalan oleh Dinas PUPR-PERA Prov.Kaltim di Jalan Simpang Pasir Kecamatan Palaran. Hasil penelitian diketahui Implementasi Kebijakan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda di Kecamatan Palaran berjalan dengan baik, meski tidak seluruh aspek pada pemeliharaan dapat dijalankan. Pemeliharaan yang Terencana pada Jalan Simpang Pasir meliputi perawatan pencegahan berfungsi dengan baik sebagaimana yang telah direncanakan, perawatan terjadwal dilakukan berkala tanpa jadwal tertetu yang telah ditetapkan, perawatan prediksi dilakukan melalui pengamatan awal. Pemeliharaan yang Tak Terencana meliputi perawatan darurat dan perawatan penangkal, kedua perawatan ini tidak dilakukan sebab belum ada kasus kerusakan jalan yang bersifat darurat hingga mengganggu lalu lintas. faktor penghambat berasal dari cuaca sehingga pemeliharaan harus dilakukan dengan memperkirakan kondisi cuaca, kendaraan bermuatan berat yang melintas menjadi faktor perlunya peningkatan kualitas jalan, penggunaan bahu jalan yang berlebih oleh masyarakat perlu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh tokoh atau lembaga sekitar.*

**Kata Kunci :** *Implementasi, Kebijakan Publik, Pemeliharaan Jalan*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [jauzashifah@gmail.com](mailto:jauzashifah@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

## **Pendahuluan**

Ketersediaan barang publik seperti prasarana jalan dan jembatan merupakan upaya pemerintah dalam memenuhi hak rakyat (Ngongolay dkk, 2019). Semakin pesat pertumbuhan penduduk, salah satu hal yang menjadi indikator keberhasilan pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat melalui kemudahan akses mobilitas adalah dengan terpenuhinya kebutuhan infrastruktur jalan (Ngongol OY dkk, 2019). Selaras dengan adanya ketersediaan infrastruktur jalan tersebut, pemeliharaan sangat diutamakan guna memperlancar arus modal, arus informasi, arus transportasi, arus barang dan jasa serta berbagai aktifitas masyarakat lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa penunjang perkembangan suatu kota adalah dengan adanya infrastruktur jalan dan pemeliharannya yang memadai (Yulianti & Hasanah, 2018).

Penanganan berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan jalan merupakan hal yang perlu dilakukan dalam pemeliharaan jalan guna mengoptimalkan pelayanan terhadap lalu lintas. Sebagaimana Peraturan Menteri PUPR NO.13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan pada Bab 1 Pasal 1 dijelaskan secara rinci mengenai pemeliharaan jalan.

Jalan Simpang Pasir yang kini berstatus sebagai Jalan Provinsi merupakan jalan strategis yang dilalui oleh kontainer peti kemas. Berdasarkan SK Nomor 100.3.3.1/K.597/2023 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan Timur, yang mana sebelumnya kegiatan pemeliharaan serta perbaikan jalan pada Jalan Simpang Pasir berada dibawah Dinas PUPR Kota Samarinda.

Dalam melaksanakan pemeliharaan jalan berstatus jalan provinsi, Bidang Bina Marga Dinas PUPR-PERA Kaltim dibantu oleh UPTD. Terkhusus wilayah Samarinda UPTD yang bertanggung Jawab terhadap pemeliharaan adalah UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II, hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2019.

Keberadaan Dinas PUPR Bidang Bina Marga dan juga UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Jalan sangat dibutuhkan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi pada infrastruktur jalan, salah satunya di Jalan Simpang Pasir. Kebijakan publik merupakan penyelesaian masalah yang telah ditetapkan oleh sekelompok orang dengan tujuan tertentu melalui serangkaian kegiatan (Anderson dalam Agustino, 2014:7). Beberapa permasalahan yang kerap kali menjadi persoalan adalah beban lalu lintas yang tinggi, air (drainase yang tidak baik dan banjir yang mengakibatkan pengikisan jalan), material konstruksi yang tidak baik, kondisi tanah yang tidak stabil, dan kesalahan dalam proses perbaikan (Sukirman (1999) dalam Jehadus, 2019).

Faktor terbesar yang menyumbang kerusakan pada jalan, khususnya jalan perekonomian seperti Jalan Simpang Pasir adalah diakibatkan karena beban berlebih (overloading) dari kendaraan berat. Struktur jalan yang disekitarnya

terdampak secara efek terjadi apabila terdapat kerusakan struktural jalan di suatu titik (Kasmira dkk, 2020).

Dengan demikian, Jalan Simpang Pasir kini berstatus sebagai jalan provinsi yang kerap kali dijadikan jalan penghubung kendaraan yang bermuatan besar dari wilayah satu ke wilayah lainnya mengakibatkan jalan yang semula dalam keadaan baik perlahan mengalami pengikisan material.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana implementasi kebijakan pemeliharaan infrastruktur jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Samarinda dan apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pemeliharaan infrastruktur jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.

Tujuan penelitian ini meliputi: (1) menganalisis implementasi kebijakan infrastruktur jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda (2) menganalisis faktor penghambat dalam implementasi kebijakan infrastruktur jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Kebijakan Publik***

Pengambilan keputusan dari beberapa pilihan oleh sekelompok aktor politik yang berkaitan dengan pencapaian tujuan (Jenkins dalam Syahrani, 2015:2). Menurut pendapat lain, kebijakan publik adalah penyelesaian masalah yang telah ditetapkan oleh sekelompok orang dengan tujuan tertentu melalui serangkaian kegiatan (Anderson dalam Agustino, 2014:7). Kebijakan publik (*public policy*) adalah upaya menyelaraskan peran negara dan masyarakat melalui aturan yang mengikat untuk mencapai tujuan-tujuan negara secara efektif dan efisien (Sekarsari dan Suyeno, 2018). Berdasarkan definisi tersebut mengandung makna bahwa kebijakan publik merupakan keputusan- keputusan yang saling berhubungan untuk mencapai sebuah tujuan dalam memecahkan suatu permasalahan.

Tahapan pada kebijakan publik diperlukan agar dapat mencapai tujuan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah. Adapaun tahapannya adalah perumusan masalah, *forecasting* (peramalan), rekomendasi kebijakan, monitoring kebijakan, dan evaluasi kebijakan (Taufiqurokhman, 2014:17).

### ***Implementasi Kebijakan***

Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai proses dari serangkaian kegiatan dengan menetapkan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Suatu penghubung antara kebijakan dengan hasil yang diharapkan merupakan pengertian lain dari kebijakan publik (Syahrani, 2015:88-89).

Tahap implementasi kebijakan baru akan berjalan ketika tujuan dan sasaran telah ditetapkan melalui formulasi terlebih dahulu. Tahapan formulasi yang

dimaksud bersifat teori yang kemudian membentuk undang-undang yang selanjutnya akan diwujudkan dalam implementasi kebijakan yang bersifat praktis (Alamsyah, 2016:66).

Pendekatan *top down* dan pendekatan *bottom up* merupakan dua pendekatan yang terdapat dalam implementasi kebijakan. Pendekatan *top down* merupakan suatu penurunan alternatif kebijakan, dimana penilaian implementasi kebijakan didasarkan pada keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dengan logika berpikir dari atas kebawah dengan menemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa implementasi berjalan sesuai tujuan atau tidak. Pendekatan *bottom up* merupakan pendekatan dari bawah ke atas yang melibatkan keseluruhan aktor yang berkaitan dengan jaringan implementasi dari yang di level bawah hingga berbagai tingkat kekuasaan.

Dalam pendapat Van Meter dan Van Horn dikemukakan bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat dua syarat dalam mempertimbangkan kebijakan agar tidak menimbulkan konflik. Syarat pertama adalah adanya kemungkinan implementasi yang akan dijalankan bergantung pada jenis kebijakan yang sedang dipertimbangkan. Syarat yang kedua yaitu tujuan yang hendak dicapai biasanya terdapat perbedaan pada setiap kebijakan (Permatasari, 2020).

### **Pemeliharaan Jalan**

Pemeliharaan adalah sebuah upaya untuk menjaga dan memperbaiki fasilitas dengan melakukan pekerjaan sebagaimana prosedur yang telah ditentukan (sesuai dengan standar fungsional dan kualitas) (Sehwarat dan Narang, 2001). Pemeliharaan pada jalan meliputi pemeliharaan rutin (*routine*) dan berkala (*periodic*) merupakan pemeliharaan yang dilakukan pada jadwal atau periode waktu tertentu yang telah ditetapkan, lalu perbaikan jalan (*betterment*) dilakukan hanya ketika terdapat kondisi kerusakan struktural jalan (Kondoatie, 2003).

Tujuan dari adanya pemeliharaan jalan menjaga dan memperpanjang umur pelayanan infrastruktur, sebagai upaya untuk mencapai laba investasi maksimum melalui pelayanan optimum dari infrastruktur yang dibangun untuk kegiatan produktif, dan memenuhi kebutuhan melalui pelayanan sesuai dengan rencana.

Kegiatan pemeliharaan memiliki beberapa fungsi yaitu menghindarkan serta menekan sekecil mungkin terdapatnya kerusakan berat dari infrastruktur selama proses operasi atau pemanfaatan pelayanan, untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan infrastruktur tersebut, meminimalisir biaya perbaikan dengan melaksanakan kegiatan pemeliharaan secara efektif dan efisien dan membantu menekan pemakaian dan penyimpangan yang di luar batas pekerjaan.

Pemeliharaan pada umumnya adalah suatu kegiatan untuk mempertahankan kondisi yang layak terkait kemampuan pelayanan infrastruktur, sehingga dapat mempertahankan fungsi, kenyamanan dan keamanan bagi pengguna infrastruktur tersebut. Sedangkan pekerjaan rehabilitasi merupakan usaha yang dilakukan untuk memperpanjang umur struktur infrastruktur ketika prediksi yang dilakukan

terhadap pemeliharaan tidak lagi mampu memelihara pelayanan operasional yang memadai. Untuk melaksanakan rehabilitasi dibutuhkan evaluasi struktur dan aksi-aksi perbaikan terlebih dahulu (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2023). Adapun jenis pemeliharaan jalan yaitu *planned maintenance* (pemeliharaan terencana) yang terdiri dari *Preventive maintenance* (perawatan pencegahan), *scheduled maintenance* (perawatan terjadwal), dan *predictive maintenance* (perawatan prediksi); sedangkan *unplanned maintenance* atau pemeliharaan yang tak terencana yang terdiri dari *emergency maintenance* (perawatan darurat) dan *corrective maintenance* (perawatan penangkal) (Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023).

### ***Definisi Konsepsional***

Definisi konsepsional merupakan pembatas antara pengertian suatu konsep dengan konsep lainnya yang digunakan dalam penelitian. Konsep yang digunakan meliputi unsur-unsur pokok yang dipergunakan dalam penelitian, agar terhindar dari biasanya penafsiran. Dapat penulis simpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan salah satunya melalui pemeliharaan jalan. Dalam penelitian ini, tindakan pemerintah yang dimaksud adalah yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda terhadap pemeliharaan infrastruktur jalan di Jalan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak menggunakan statistik tetapi menggunakan pendekatan naturalistik, di mana penelitian ini berupaya mendapatkan pencerahan dan mengeksplorasi suatu fenomena melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan (Albi dan Johan Setiawan, 2018:9). Penelitian ini berfokus pada pemeliharaan terencana dan pemeliharaan yang tak terencana dengan memperhatikan teori Van Meter dan Van Horn, serta berfokus pada faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pemeliharaan infrastruktur jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kota Samarinda.

Sumber data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber utamanya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan oleh Staf Perencanaan Jalan dan Jembatan, Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur dan Pengawas Jalan dan Jembatan, UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II sebagai *key informan*. Adapun sekretaris Lurah Simpang Pasir dan masyarakat di sekitar Jalan Simpang Pasir menjadi informan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder sebagai pendukung dari data primer yang tersusun rapi dalam bentuk dokumen, bahan pustaka, *literature*, *website*

resmi pemerintah, penelitian terdahulu, *e-book*, dan jurnal berupa foto atau catatan lainnya.

Teknik analisis data dijabarkan melalui tiga alur yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu, kondensasi data dengan memfokuskan pada tema yang dicari, penyajian data yang merupakan proses pengorganisasian dan penyatuan informasi, dan pengambilan kesimpulan serta verifikasi melalui pengamatan data (Sugiyono, 2017:246-252).

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Standar dan sasaran kebijakan dalam pelaksanaan yang dilakukan Dinas PUPR-PERA Prov.Kaltim sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, sasaran Dinas PUPR-PERA Prov.Kaltim salah satunya adalah dengan meningkatnya kualitas infrastruktur jalan serta meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik di Jalan Simpang Pasir, Palaran sebagai jalan Provinsi. Sedangkan standar yang ditetapkan untuk mengukur suatu keberhasilan didapat melalui prosedur yang telah ditetapkan seperti yang terdapat dalam Peraturan Menteri PUPR No. 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara dan Penilaian Jalan. Dilansir pada BERITAKALTIM.CO, Dinas PUPR-PERA Prov Kaltim pada tahun 2024 memiliki tujuan meningkatkan kemantapan jalan provinsi.

Implementasi terhadap pemeliharaan infrastruktur jalan pada Jalan Simpang Pasir dapat dilihat melalui pemeliharaan yang terencana dan pemeliharaan yang tidak terencana, serta faktor yang menjadi penghambat dalam pemeliharaan, adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

#### ***Pemeliharaan yang Terencana***

*Planned maintance* adalah perencanaan yang dilakukan sebelum kegiatan pemeliharaan dilaksanakan (Kementrian PUPR, 2023:7).

Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan yang dilakukan oleh Dinas PUPR- PERA Prov.Kaltim adalah dengan melakukan survei lokasi yang menjadi tujuan dalam perbaikan. Sama halnya dengan UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II juga melihat kondisi jalan dibantu dengan tim survei yang mereka miliki. Khusus pemeliharaan yang bersifat ringan menjadi program tersendiri dari UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Perbaikan Umum Wilayah II.

Dalam perencanaannya Dinas PUPR-PERA Prov. Kaltim bekerja sama dengan konsultan untuk menentukan berapa biaya dan jenis penanganan apa yang sesuai dengan kerusakan jalan. Kemudian hasil yang didapatkan akan dirancang menjadi suatu program yang akan mereka lakukan kedepannya.

Berdasarkan hasil penelitian, pemeliharaan yang terencana dilakukan Bidang Bina Marga Dinas PUPR-PERA Prov.Kaltim telah berjalan dengan baik, meski perbaikan Jalan pada Jalan Simpang Pasir oleh Dinas PUPR- PERA Prov.Kaltim belum terlaksana, pada tahun 2024 ini sedang dalam tahap

perencanaan, sedangkan untuk pemeliharaan yang telah dilakukan tidak terlepas dari survei oleh tim survei.

1. *Preventive maintenance (perawatan pencegahan)*

*Preventive maintenance* adalah pemeliharaan yang bertujuan agar infrastruktur yang dibangun berfungsi sesuai dengan rencana dan dilaksanakan dalam periode waktu yang telah ditetapkan atau sesuai dengan kriteria tertentu (Kementrian PUPR, 2023:7).

Perawatan pencegahan pada Jalan Simpang Pasir dilakukan dengan melakukan inspeksi kondisi lapangan terlebih dahulu, sehingga pemeliharaan jalan pada Jalan Simpang Pasir telah sesuai dengan spesifikasi dengan rencana umur 5 tahun.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka perawatan pencegahan yang dilakukan oleh Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur khususnya UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II telah dijalankan dengan baik. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan, pemeliharaan jalan telah dilakukan, walau tidak menyeluruh. Adapun kondisi jalan yang sering mendapat perhatian adalah jalan yang memiliki kerusakan parah dan membahayakan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pemeliharaan yang ada di Jalan Simpang pasir sudah baik. Pada penelitian terdahulu pemeliharaan jalan telah terealisasi namun tidak semua dilaksanakan (Yulianti, 2018), sebagaimana penelitian ini pemeliharaan dilakukan pada jalan yang memiliki kerusakan yang cukup berat sesuai dengan kriteria, sehingga pada jalan yang mengalami kerusakan ringan kurang menjadi prioritas dalam pemeliharaan.

2. *Scheduled maintenance (perawatan terjadwal)*

*Scheduled maintenance* merupakan perawatan yang dilakukan secara periodik dalam rentang waktu tertentu dengan tujuan mencegah terjadinya kerusakan (Kementrian PUPR, 2023:7).

Berdasarkan hasil penelitian, penjadwalan menjadi salah satu rencana awal dalam perbaikan yang dilakukan oleh Bina Marga Dinas PUPR-PERA Prov.Kaltim, namun berbeda dengan UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II pemeliharaan dapat dilakukan tanpa ada penjadwalan khusus atau dapat dilakukan kapan saja ketika terdapat kerusakan pada jalan.

Maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perawatan terjadwal akan berjalan tergantung pada situasi dan kondisi di lapangan. Perbaikan yang membutuhkan rekonstruksi besar dapat di jadwalkan, sebab harus melalui perencanaan yang panjang. Sedangkan pada kerusakan ringan sifatnya tidak menentu dan dapat kembali rusak sewaktu-waktu meski sudah pernah dilakukan pemeliharaan. Dalam penelitian ini didapat bahwa, perawatan terjadwal belum dilakukan dengan baik karena pemeliharaan jalan hanya berfokus ketika jalan mengalami kerusakan.

Pada penelitian terdahulu disebutkan bahwa pemeliharaan tidak terlaksana sebagaimana peraturan Walikota Manado No.32 Tahun 2017 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado Tipe B (Ngongol OY dkk, 2019). Hasil penelitian terdahulu serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, pemeliharaan tidak terlaksana terkhusus pada penelitian ini perawatan tidak terjadwal yang dilakukan oleh Dinas PUPR-PERA Prov.Kaltim atapun UPTD Peeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II.

### 3. *Predictive maintenance* (perawatan prediksi)

*Predictive maintenance* adalah perawatan yang dilakukan dengan strategi dan pelaksanaannya didasarkan pada kondisi tertentu yang biasanya terjadi. Misalkan pada musim hujan sering banjir, dsb (Kementerian PUPR, 2023: 7).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis melalui wawancara, pihak-pihak yang terkait dengan perbaikan atau pemeliharaan jalan telah memperkirakan atau memprediksi langkah apa yang akan mereka lakukan kedepannya. Pada Jalan Simpang Pasir Dinas PUPR-PERA Prov. Kaltim telah membuat strategi dengan mempertimbangkan beban kendaraan yang melintas, banyaknya kendaraan yang melintas, hingga kekuatan struktur jalan yang akan dilakukan perbaikan.

Penulis menyimpulkan bahwa hasil dari perawatan prediksi baru akan terlihat jika telah terlaksana. Mengingat SK tahun 2023 tentang ruas jalan Provinsi, saat ini Jalan Simpang Pasir masih dalam tahap perencanaan oleh Dinas PUPR-PERA Prov. Kaltim, sehingga perawatan yang melalui tahap prediksi belum dilakukan. Meski demikian, melihat pada strategi yang telah dirancang oleh Dinas PUPR-PERA Prov. Kaltim, maka dapat dilihat bahwa tahap awal dari perawatan prediksi telah dilakukan dengan baik.

Pada penelitian terdahulu pelaksanaan program berjalan melalui beberapa strategi dengan sistem penyusunan, mulai dari survei lokasi, penganggaran, pengawasan yang dilakukan tim pelaksana untuk mendapatkan informasi terhadap jenis kerusakan dan cara penanganannya (Faturrahman, 2021). Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dalam setiap rencana kerja Dinas PUPR-PERA Prov. Kaltim tetap memperhatikan strategi yang akan dilakukan untuk mengatasi berbagai persoalan dilapangan.

### ***Pemeliharaan yang Tak Terencana***

*Unplanned maintenance* adalah pemeliharaan yang dilakukan tanpa perencanaan terlebih dahulu atau dapat dikatakan pemeliharaan darurat, yang mana pemeliharaan ini perlu dilakukan segera melalui tindakan untuk mencegah akibat yang serius, misalkan hilangnya fungsi, kerusakan besar pada infrastruktur, atau untuk alasan keselamatan kerja (Kementerian PUPR, 2023: 8).

### 1. Perawatan darurat (*Emergency maintenance*)

*Emergency maintenance* merupakan penanggulangan yang bersifat darurat dari kegiatan pemeliharaan agar tidak menimbulkan akibat yang lebih parah atau kegagalan fungsi (Kementerian PUPR, 2023: 8).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, selama masa peralihan status jalan dari Dinas PUPR Kota menjadi dibawah Dinas PUPPERA Provinsi Kalimantan Timur, perawatan darurat pada Jalan Simpang Pasir tidak pernah dilakukan, hal ini dikarenakan akses jalan yang masih dapat dilalui meski terdapat kerusakan atau dalam artian kerusakan tidak berada pada jenis jalan yang mengalami kerusakan sangat berat hingga mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas. Kerusakan besar pernah terjadi beberapa tahun kebelakang, namun hal itu dapat ditangani.

Maka dapat penulis simpulkan bahwa, perawatan darurat pada jalan Simpang Pasir belum terlaksana dikarenakan memang belum ada kondisi jalan yang membutuhkan penanganan darurat, baik karena faktor alam ataupun faktor kelalaian manusia.

### 2. Perawatan penangkal (*corrective maintenance*)

*Corrective maintenance* yakni pemeliharaan yang dilaksanakan karena fungsi dari infrastruktur tidak sesuai lagi dengan rencana (Kementerian PUPR, 2023: 8).

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa adanya kerusakan pada jalan Simpang Pasir tidak begitu bermasalah sebab kerusakan pada jalan Simpang Pasir dinilai masih dalam kondisi yang dapat dilalui oleh kendaraan., walaupun demikian masyarakat juga menyayangkan jika terdapat titik-titik retak jalan yang tidak segera ditangani. Hal ini akan menyebabkan kerusakan struktur jalan yang lebih besar lagi.

Maka dapat penulis simpulkan bahwa perawatan penangkal belum berjalan maksimal, berdasarkan hasil observasi di lapangan, kerusakan di Jalan Simpang Pasir memang tidak banyak, hanya di beberapa titik dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Namun, kerusakan struktural pada satu titik dapat mengakibatkan kerusakan lain disekitarnya.

## **Faktor Penghambat Pemeliharaan Infrastruktur Jalan**

Implementasi pemeliharaan infrastruktur jalan pada Jalan Simpang pasir tidak selalu berjalan dengan lancar. Ada saja hambatan yang terjadi selama, saat, atau setelah proses pemeliharaan jalan dilakukan. Berikut ini penulis memaparkan beberapa faktor penghambat dalam implementasi pemeliharaan infrastruktur jalan di Jalan Simpang Pasir berdasarkan hasil wawancara di lapangan, sebagai berikut:

### 1. Kondisi Alam yang Tidak Menentu

Dalam pekerjaan konstruksi, faktor cuaca dan iklim memainkan peran penting sebagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keamanan, kelancaran, dan kualitas pekerjaan konstruksi (Nugroho, Yudi:2024).

Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya salah satu yang menjadi penghambat adalah faktor cuaca yang tidak menentu terutama di Kalimantan yang memiliki iklim yang berubah - ubah. Hal ini mengakibatkan implementasi di Jalan Simpang Pasir tidak bisa maksimal, dikarenakan kondisi cuaca yang cenderung berubah.

### 2. *Besarnya Volume Kendaraan yang Melintas*

Faktor-faktor yang menjadi penyebab kerusakan pada rekonstruksi jalan adalah beban lalu lintas yang tinggi, air (drainase yang tidak baik dan banjir yang mengakibatkan pengikisan jalan), material konstruksi yang tidak baik, kondisi tanah yang tidak stabil, dan kesalahan dalam proses perbaikan (Sukirman (1999) dalam Jehadus, 2019). Jika dilihat pada hasil wawancara, maka salah satu penyumbang terbesar pada kerusakan jalan ialah volume kendaraan yang melebihi kemampuan jalan, sehingga kerusakan pada jalan seringkali terjadi.

### 3. *Penggunaan Bahu Jalan yang Melewati Batas oleh Masyarakat*

Menurut Daniel A. Mazmian dan Paul. Sabatier salah satu variabel yang memengaruhi implementasi ialah dari aspek lingkungan kebijakan yaitu melihat kondisi lingkungan masyarakat dari segi perkembangan sosial, ekonomi dan teknologi. Mengenali sifat masyarakat apakah sudah terbuka atau masih tertutup dan mengikuti perkembangan lingkungan sosial pada masyarakat.

Dari hasil penelitian diatas didapatkan bahwa masyarakat memberikan kendala yakni kebiasaannya yang seringkali mengambil lahan diluar batas wilayahnya. Dimana lahan yang digunakan berupa bahu jalan. Sehingga dalam hal ini jika masyarakat tidak menerima perubahan yang terjadi akibat perbaikan, maka implementasi tidak akan berjalan.

## **Penutup**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan analisis data yang dilakukan penulis tentang implementasi pemeliharaan infrastruktur jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda di Jalan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dan dihubungkan dengan tujuan penelitian, maka penulis menarik kesimpulan Pemeliharaan yang Terencana pada Jalan Simpang Pasir telah dilakukan dengan baik. Melalui survei lapangan serta melibatkan pihak ketiga, program yang akan dijalankan dapat direncanakan.

1. Perawatan pencegahan pada Jalan Simpang Pasir sudah baik sesuai dengan fungsi yang direncanakan.
2. Perawatan terjadwal untuk mencegah terjadinya kerusakan belum baik, karena belum terdapat jadwal tertentu dalam pemeliharaan pada ruas jalan. Jalan Simpang Pasir dari segi perbaikan masih dalam tahap perencanaan, sedangkan

pada pemeliharaan pada kerusakan ringan dilakukan tanpa jadwal tertentu dan melalui survei lapangan yang dilakukan secara berkala.

3. Perawatan prediksi cukup baik dari segi prediksi namun belum terlaksana, hal ini dikarenakan adanya pengamatan awal dan kepekaan pihak-pihak terkait terhadap permasalahan yang akan dihadapi.
4. Pemeliharaan yang Tak Terencana meliputi perawatan darurat sejauh ini belum terjadi di Jalan Simpang Pasir, sehingga tidak ada penanganan khusus yang harus dilakukan.
5. Perawatan penangkal pada Jalan Simpang Pasir kurang perlu dilakukan karena tingkat kerusakan masih dalam batas wajar dan tidak mengganggu akses lalu lintas.
6. Faktor penghambat pada pemeliharaan infrastruktur jalan di Jalan Simpang Pasir adalah kondisi alam yang tidak menentu, besarnya volume kendaraan yang melintas, dan terhambatnya perbaikan akibat masyarakat yang mengambil bahu jalan, serta tidak adanya jadwal khusus untuk dilaksanakan pemeliharaan.

### **Saran**

Memperhatikan analisis serta temuan-temuan berkenaan dengan implementasi pemeliharaan infrastruktur jalan oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota samarinda di jalan simpang pasir kecamatan palaran, maka penulis perlu mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan cuaca, sebagai upaya awal adalah dengan melihat perkiraan cuaca untuk beberapa waktu kedepan melalui pantauan BMKG, memahami kondisi cuaca di suatu wilayah, misalnya sering terjadi hujan siang hingga sore hari, maka pekerjaan perbaikan dapat dilakukan pada pagi hari.
2. Kendaraan bermuatan berat, meningkatkan kualitas bahan yang akan digunakan dalam perbaikan.
3. Penggunaan bahu jalan yang berlebih oleh masyarakat, bekerja sama dengan tokoh atau lembaga dan organisasi sekitar memberikan penyuluhan atau sosialisasi secara merata tentang batas lahan yang digunakan.
4. Perawatan terjadwal dapat dilakukan pada periode waktu tertentu atau berdasarkan jadwal yang telah ditentukan agar mencegah terjadinya kerusakan ringan yang dapat berimbas pada kerusakan yang lebih besar.

### **Daftar Pustaka**

- Alamsyah, Kamal. 2016. Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi. Bandung : Media Citra Mandiri Press.
- Anggito, Albi & Johan Setiawan. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi : CV Jejak.
- Fatturrahman, Rifqi. 2022. Pelaksanaan Program Pemeliharaan Jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda di Kecamatan Sungai Kunjang. E-journal Administrasi Publik. 9(3), <https://ejournal.ap.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/20>

- 22/01/Ejournal%20Rizqi%20Fathurrahman%20AP%202014%20(2)%20(01-18-22-02-02-15).pdf (diakses pada 2 September 2023)
- Jehadus, Silvester. 2019. Analisis Faktor Penyebab Kerusakan Jalan Raya Lintas Labuan Bajo-Lembor Flores Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Penelitian*, <http://repository.untag-sby.ac.id/1248/8/JURNAL.pdf> (diakses pada 12 November 2023)
- Jurnal Politik, Sosial & Kebijakan Publik (Publicio)*, Vol. 3, No. 2 Bulan Juli 2021. <https://doi.org/10.51747/publicio.v3i2.774> (diakses pada 24 Juni 2024)
- Kasmira, K., Alyas, A., & Sudarmi, S. 2020. Strategi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(3), 818-833, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3737> (diakses pada 26 Mei 2024)
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2023. *Buku Saku Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Desa*. Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman. [https://ibmpkp.pu.go.id/assets/public/8Buku\\_Saku\\_Pemanfaatan\\_dan\\_Pemeliharaan\\_Infrastruktur\\_Desa\\_2023.pdf](https://ibmpkp.pu.go.id/assets/public/8Buku_Saku_Pemanfaatan_dan_Pemeliharaan_Infrastruktur_Desa_2023.pdf) (diakses pada 30 Mei 2023)
- Kertati, Indra, dkk. 2019. *Implementasi Kebijakan Publik (Dari Hulu Ke Hilir)*. Kota Jambi : PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nugroho, Yudi. 2024. Faktor Cuaca dan Iklim Menentukan Pada Pekerjaan Kontruksi karena?. *Tambah Pinter.com*. <https://tambahpinter.com/faktor-cuaca-dan-iklim-turut-menentukan-pada-pekerjaan-konstruksi-karena/> (diakses pada 24 Juni 2024)
- Ngongoloy, V. R., Kimbal, M., & Waworundeng, W. (2019). Implementasi Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*,5(80),<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/25450/25107>(diakses pada 20 Oktober 2022)
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Pramono, Joko. 2020. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Kota Surakarta : UNISRI Press.
- Permatasari, Iman Amanda. 2020. *Book Review Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Yogyakarta : CV. The Journal Publishing. Volume 1 Nomor 1 Maret 2020: *TheJournalish* Hal.034-038, <https://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7/5> (diakses pada 24 Juni 2024)

- Sekarsari, R. W., & Suyeno, S. 2018. Implementasi Kebijakan Pembangunan Jalan Antar Kecamatan Di Kabupaten Kediri. *JU-ke (Jurnal Ketahanan Pangan)*, 2(1), 12-25, <http://jim.unisma.ac.id/index.php/JU-ke/article/view/1047> (diakses pada 20 Oktober 2022)
- Setyawan, Dody, dkk. 2021. Model George Edward III: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang. Malang : Publicio: Jurnal Ilmiah Politik dan Kebijakan Sosial.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sulistiyawati. 2023. *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : K-Media
- Syahrani. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Markindog Grafika
- Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta Pusat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (pers)
- Yulianti, R., & Hasanah, B. 2018. Implementasi Program Pemeliharaan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pandeglang. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 6(2), 111-125, <https://doi.org/10.30656/sawala.v6i2.926> (diakses pada 30 Oktober 2023)